

Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik di Desa Silian

Galatia Marskin Manoppo¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606055@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 14, 2025

Accepted March 25, 2025

Published May 30, 2025

Kata Kunci:

Partisipasi Politik,
 Demokrasi Desa,
 Kesadaran Politik,
 Pemerintahan Desa,
 Partisipasi Masyarakat



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Silian, dengan fokus pada kesadaran politik, strategi peningkatan partisipasi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap anggota masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-interpretatif dengan tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Desa Silian telah berkembang dengan baik, meskipun tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Strategi peningkatan partisipasi dilakukan melalui mobilisasi, pendidikan politik, dan pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai kelompok termasuk perempuan. Namun, implementasi partisipasi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara partisipasi formal dan substantif, hambatan kultural, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi demokrasi, transformasi nilai sosial, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan desa untuk mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna dan inklusif.

Abstract

This study aims to analyze community participation in political democracy in Silian Village, focusing on political awareness, strategies for increasing participation, and challenges faced in its implementation. The study used a qualitative approach with data collection techniques through observation and in-depth interviews with purposively selected community members. Data were analyzed using descriptive-interpretive techniques with the stages of data reduction, data display, and verification. The results show that the political awareness of the people of Silian Village has developed well, although not evenly across all levels of society. Strategies to increase participation are implemented through mobilization, political education, and an inclusive approach involving various groups, including women. However, the implementation of participation still faces challenges in the form of a gap between formal and substantive participation, cultural barriers, and limited village institutional capacity. This study recommends strengthening democratic literacy, transforming social values, and increasing transparency and accountability in village government to realize more meaningful and inclusive participation.

Keywords: Political Participation, Village Democracy, Political Awareness, Village Government, Community Participation

A. Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia tidak hanya berlangsung pada tingkat nasional, tetapi juga mengakar hingga ke level paling bawah yaitu desa. Partisipasi masyarakat dalam proses politik desa merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Widjaja, 2003). Dalam konteks otonomi desa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diberikan ruang yang luas

untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa (Antlov et al., 2016). Partisipasi ini tidak hanya sebatas kehadiran dalam forum-forum formal, tetapi juga mencakup keterlibatan substantif dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Gaventa, 2004).

Desa Silian sebagai salah satu entitas pemerintahan terkecil memiliki dinamika tersendiri dalam mengimplementasikan praktik demokrasi partisipatif. Kondisi geografis, struktur sosial, tingkat pendidikan, dan kesadaran politik masyarakat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi politik di tingkat desa (Sutiyo & Maharjan, 2017). Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat desa sering kali masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti dominasi elite lokal, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak politiknya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa (Pradana et al., 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan legitimasi bagi partisipasi masyarakat, implementasi di lapangan masih memerlukan kajian mendalam untuk memahami hambatan dan peluang yang ada.

Berbagai kajian mengenai partisipasi politik di tingkat desa telah dilakukan dengan fokus yang beragam, mulai dari mekanisme musyawarah desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran (Suwarno, 2016). Namun, setiap desa memiliki karakteristik unik yang membentuk pola partisipasi politik yang berbeda, sehingga diperlukan studi yang kontekstual dan spesifik lokasi untuk memahami bagaimana demokrasi politik bekerja dalam realitas keseharian masyarakat desa (Nurcholis, 2011). Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Silian menjadi penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi yang berkembang, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, serta implikasi dari partisipasi tersebut terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiyo dan Maharjan (2017) tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa di Indonesia menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan desa dan kualitas kepemimpinan kepala desa. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap beberapa desa di Jawa Tengah dan menemukan bahwa desa dengan kepemimpinan yang inklusif dan transparan cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam musyawarah desa dan perencanaan pembangunan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa faktor pendidikan dan akses informasi menjadi determinan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat desa, di mana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah desa. Temuan ini memberikan gambaran bahwa partisipasi politik di desa tidak hanya ditentukan oleh kerangka formal yang ada, tetapi juga oleh dinamika sosial dan kapasitas individu masyarakat.

Sementara itu, Pradana et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai implementasi demokrasi desa pasca-Undang-Undang Desa mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan ruang partisipasi yang luas, dalam praktiknya masih terdapat dominasi elite lokal yang menghambat partisipasi substantif masyarakat. Studi kasus di beberapa desa di Jawa Timur menunjukkan bahwa forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa sering kali hanya menjadi formalitas belaka, di mana keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh segelintir elite desa tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara genuine (Pradana et al., 2017). Penelitian lain oleh Antlov et al. (2016) yang mengkaji efektivitas mekanisme partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa menemukan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah desa menjadi kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna. Studi ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keterbukaan dalam proses pengambilan

keputusan sebagai prasyarat bagi partisipasi politik yang efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa, sebagian besar studi tersebut dilakukan pada desa-desa di Jawa yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan budaya tertentu, sehingga temuan-temuannya belum tentu dapat digeneralisasi ke konteks desa lain di luar Jawa atau desa dengan karakteristik geografis dan demografis yang berbeda. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek formal partisipasi seperti kehadiran dalam musyawarah desa atau pemilihan kepala desa, namun kurang mengeksplorasi dimensi informal partisipasi politik yang mungkin berkembang dalam interaksi keseharian masyarakat desa. Terdapat kesenjangan pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor lokal spesifik seperti tradisi, norma sosial, jaringan kekerabatan, dan dinamika kelompok sosial di suatu desa tertentu membentuk pola dan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Research gap juga terlihat dalam minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif multi-dimensi dalam memahami partisipasi politik di desa, di mana kebanyakan studi sebelumnya menggunakan pendekatan tunggal baik kuantitatif maupun kualitatif tanpa mengombinasikan keduanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana konteks lokal yang unik dari suatu desa, seperti Desa Silian, dengan segala kompleksitas sosial, ekonomi, dan politiknya, mempengaruhi praktik demokrasi partisipatif dan bagaimana masyarakat memaknai serta mengaktualisasikan partisipasi politik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendalam tentang konteks spesifik ini penting untuk mengembangkan strategi penguatan partisipasi yang sesuai dengan realitas lokal dan tidak sekadar menerapkan model-model umum yang belum tentu efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada Desa Silian dengan pendekatan kontekstual yang mendalam untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik dengan mempertimbangkan keunikan lokal baik dari aspek sosial-budaya, ekonomi, maupun geografis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek formal partisipasi seperti kehadiran dalam forum-forum resmi pemerintahan desa, tetapi juga mengeksplorasi dimensi informal dan simbolik dari partisipasi politik yang termanifestasi dalam interaksi sosial, diskusi-diskusi tidak formal, serta mekanisme pengambilan keputusan tradisional yang mungkin masih eksis di tengah masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kompleksitas partisipasi politik yang tidak hanya terbatas pada definisi formal-prosedural, tetapi juga mencakup praktik-praktik partisipasi yang berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat.

Novelty lainnya adalah penggunaan pendekatan integratif yang mengombinasikan analisis struktural mengenai kerangka kelembagaan dan mekanisme formal partisipasi dengan analisis agensi yang mengeksplorasi bagaimana masyarakat sebagai aktor politik di tingkat grass-root memaknai, merespon, dan mengaktualisasikan partisipasi mereka dalam konteks keterbatasan dan peluang yang ada. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok marginal dalam struktur sosial desa seperti perempuan, pemuda, dan kelompok ekonomi lemah untuk memahami apakah dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses politik desa, mengingat penelitian-penelitian sebelumnya sering kali kurang memberikan perhatian pada dimensi inklusivitas dan kesetaraan dalam partisipasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya pemahaman tentang demokrasi partisipatif di tingkat lokal serta kontribusi praktis dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan bermakna.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Desa Silian, seperti banyak desa lainnya di

Indonesia, menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi partisipatif yang ideal. Observasi awal mengindikasikan bahwa meskipun forum-forum partisipasi seperti musyawarah desa telah diselenggarakan secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tingkat partisipasi aktif masyarakat masih bervariasi dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu saja. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara partisipasi formal yang terukur dari kehadiran fisik dengan partisipasi substantif yang ditandai oleh keterlibatan aktif dalam diskusi, penyampaian aspirasi, dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti kesibukan ekonomi, rendahnya pemahaman tentang isu-isu pemerintahan, serta persepsi bahwa pendapat mereka tidak akan didengarkan, menjadi alasan yang sering disampaikan oleh masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi.

Di sisi lain, terdapat pula dinamika positif di mana sebagian masyarakat Desa Silian mulai menunjukkan kesadaran politik yang meningkat seiring dengan akses informasi yang semakin terbuka melalui media sosial dan peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat seperti karang taruna, kelompok tani, dan organisasi perempuan mulai aktif mengorganisir diri untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam forum-forum desa, meskipun masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mempengaruhi kebijakan. Realitas ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di Desa Silian berada dalam proses transisi dari model partisipasi yang pasif dan elitis menuju partisipasi yang lebih inklusif dan demokratis, namun proses ini masih memerlukan waktu dan intervensi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Penelitian mendalam tentang kondisi ini menjadi urgen untuk memahami bagaimana proses demokratisasi di tingkat desa dapat diperkuat melalui strategi yang berbasis pada pemahaman atas realitas lokal yang kompleks dan dinamis.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Silian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif masyarakat terhadap praktik demokrasi politik dalam konteks sosial-budaya yang spesifik (Creswell, 2014). Metode kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi secara natural dan kontekstual, sehingga dapat mengungkap kompleksitas partisipasi politik yang tidak hanya terbatas pada aspek formal-prosedural tetapi juga dimensi informal dan simbolik yang berkembang dalam kehidupan keseharian masyarakat desa (Sugiyono, 2017). Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma interpretif yang menekankan pada pemahaman subjektif aktor sosial terhadap realitas yang mereka alami, khususnya dalam konteks keterlibatan mereka dalam proses-proses politik di tingkat desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik partisipasi masyarakat dalam berbagai forum dan kegiatan politik desa, termasuk musyawarah desa, pertemuan kelompok masyarakat, dan interaksi informal antar warga yang berkaitan dengan isu-isu politik lokal. Menurut Bungin (2007), observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data autentik tentang perilaku dan interaksi sosial dalam setting alamiah tanpa manipulasi variabel, sehingga dapat menangkap dinamika partisipasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu anggota masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, termasuk tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, dan warga biasa dengan tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan

secara lebih mendalam dan mengikuti arah percakapan yang berkembang secara natural (Moleong, 2014). Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretatif yang mengikuti tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan melakukan transkripsi hasil wawancara dan catatan lapangan dari observasi, kemudian mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dari data. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan dan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan meminta persetujuan sebelum melakukan wawancara dan observasi, sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian sosial yang menekankan pada penghormatan terhadap hak dan martabat subjek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Kesadaran dan Motivasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Silian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Silian terhadap pentingnya partisipasi dalam demokrasi politik sudah mulai berkembang dengan baik. Hasil wawancara dengan Ibu JM mengungkapkan bahwa,

”...sebagai warga masyarakat, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam demokrasi politik baik dalam pemilihan DPRD, Bupati, Presiden, maupun kegiatan politik yang berkaitan langsung dengan Desa Silian”.

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu JM



Sumber: Data Primer

Kesadaran ini mencerminkan adanya pemahaman bahwa partisipasi politik bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat desa. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memang menjadi elemen krusial dalam menjalankan proses demokrasi, karena tanpa keterlibatan masyarakat, mekanisme politik tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi politik didorong oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran akan hak-hak politik mereka dan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Dari hasil wawancara dengan Ibu KK, terungkap bahwa,

”...keterlibatan masyarakat dalam demokrasi politik dipandang sangat positif karena memberikan pengalaman berharga dan kesempatan belajar tentang proses politik”.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu KK



Sumber: Data Primer

Pandangan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya dilihat sebagai tindakan formal dalam memberikan suara atau menghadiri rapat, tetapi juga sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas politik masyarakat. Kesadaran semacam ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun budaya demokrasi yang lebih matang dan partisipatif di tingkat desa.

Namun demikian, tingkat kesadaran dan motivasi ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat Desa Silian. Hasil observasi mengindikasikan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah menunjukkan kesadaran politik yang baik, masih terdapat kelompok masyarakat yang partisipasinya masih minimal akibat berbagai faktor seperti kesibukan ekonomi, rendahnya akses informasi, atau bahkan sikap apatis terhadap politik. Perbedaan tingkat kesadaran ini menghasilkan variasi dalam intensitas dan kualitas partisipasi politik di kalangan masyarakat. Kelompok masyarakat yang lebih terdidik dan memiliki akses informasi yang lebih baik cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dan kritis, sementara kelompok dengan keterbatasan pendidikan dan informasi cenderung berpartisipasi secara minimal atau sekadar memenuhi kewajiban formal tanpa keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan.

b. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik

Penelitian mengidentifikasi bahwa strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Silian sangat bergantung pada upaya mobilisasi dan edukasi yang dilakukan secara kontinyu. Hasil wawancara dengan Ibu VT mengungkapkan bahwa,

”...salah satu cara efektif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat adalah dengan mengajak dan melibatkan mereka dalam berbagai hal yang berkaitan dengan demokrasi politik, baik dalam pemilihan umum maupun aktivitas politik lainnya”.

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu VT



Sumber: Data Primer

Strategi ini menekankan pentingnya pendekatan personal dan komunikasi langsung dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Mobilisasi masyarakat tidak hanya dilakukan menjelang pemilihan umum, tetapi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Pendekatan partisipatif dalam peningkatan keterlibatan masyarakat juga memerlukan pembangunan kapasitas melalui pendidikan politik dan literasi demokrasi. Dari hasil observasi terlihat bahwa pemahaman masyarakat tentang mekanisme demokrasi, hak dan kewajiban politik, serta cara-cara berpartisipasi secara efektif masih perlu ditingkatkan. Program-program sosialisasi, pelatihan, dan diskusi publik tentang isu-isu politik dan pemerintahan desa dapat menjadi media untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi politik dan membuka ruang dialog yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang secara tradisional kurang terwakili dalam forum-forum politik formal.

Strategi peningkatan partisipasi juga perlu memperhatikan aspek inklusivitas dengan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan seperti Ibu JM, Ibu VT, dan Ibu KK telah menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk berpartisipasi aktif, yang merupakan indikator positif bagi demokratisasi di tingkat desa. Namun, perlu ada mekanisme yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa suara-suara mereka dan kelompok-kelompok lain yang sering terpinggirkan benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memerlukan komitmen dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk menciptakan ruang partisipasi yang aman, terbuka, dan responsif terhadap keberagaman aspirasi masyarakat.

c. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Partisipasi Politik

Meskipun kesadaran dan strategi peningkatan partisipasi telah ada, implementasi partisipasi politik di Desa Silian masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kesenjangan antara partisipasi formal dan partisipasi substantif, di mana kehadiran masyarakat dalam forum-forum politik tidak selalu diikuti dengan keterlibatan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Fenomena

ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam banyak kasus masih bersifat simbolik atau sekadar memenuhi kewajiban formal, tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap proses demokratisasi. Hambatan struktural seperti dominasi elite lokal, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa, dan terbatasnya akses informasi bagi masyarakat menjadi faktor-faktor yang menghambat partisipasi substantif.

Hambatan kultural juga menjadi tantangan signifikan dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan bermakna. Tradisi dan norma sosial yang masih mengakar di masyarakat desa, seperti hierarki sosial, patronase, dan sikap paternalistik, dapat membatasi ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarkan aspirasi mereka secara bebas. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa meskipun perempuan sudah mulai aktif berpartisipasi, masih terdapat stereotip dan ekspektasi sosial yang membatasi peran mereka dalam politik. Demikian pula dengan kelompok pemuda dan masyarakat ekonomi lemah yang sering kali merasa suara mereka tidak memiliki bobot yang sama dengan kelompok elite atau tokoh masyarakat yang lebih dominan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi politik tidak hanya memerlukan intervensi formal-institusional, tetapi juga transformasi nilai dan sikap dalam masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat secara efektif. Meskipun kerangka regulasi telah memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti musyawarah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknis. Hasil observasi menunjukkan bahwa forum-forum partisipasi kadang tidak dirancang dan difasilitasi dengan baik, sehingga tidak mampu menangkap aspirasi masyarakat secara komprehensif dan menghasilkan keputusan yang benar-benar representatif. Selain itu, kurangnya mekanisme akuntabilitas dan umpan balik membuat masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak berdampak nyata terhadap kebijakan dan program pembangunan desa. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal.

2. Pembahasan

a. Kesadaran dan Motivasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Silian

Temuan penelitian mengenai kesadaran masyarakat Desa Silian terhadap pentingnya partisipasi dalam demokrasi politik sejalan dengan konsep partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1976) yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat bahwa partisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban mencerminkan adanya pemahaman tentang demokrasi substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada aspek formal seperti pemilihan umum (Dahl, 1989). Dalam konteks pemerintahan desa, kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting untuk membangun tata kelola yang demokratis dan partisipatif, sebagaimana ditekankan oleh Putnam (1993) bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan kolektif. Kesadaran politik yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Silian menunjukkan adanya proses pembelajaran politik yang bertahap, di mana masyarakat mulai memahami bahwa suara dan partisipasi mereka memiliki nilai dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di tingkat desa.

Motivasi partisipasi masyarakat yang didorong oleh keinginan untuk berkontribusi dalam

pembangunan desa dan memperoleh pengalaman politik dapat dijelaskan melalui teori partisipasi yang dikembangkan oleh Verba et al. (1995) yang mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu sumber daya (resources), motivasi psikologis (psychological engagement), dan jaringan rekrutmen (recruitment networks). Temuan bahwa partisipasi dipandang sebagai proses pembelajaran menunjukkan adanya dimensi edukatif dalam demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Pateman (1970) bahwa partisipasi memiliki fungsi edukatif yang dapat meningkatkan kapasitas politik warga negara. Proses pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme politik, tetapi juga mengembangkan keterampilan deliberatif, kemampuan berpikir kritis, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Mansbridge, 1999). Dalam konteks desa, pembelajaran politik melalui partisipasi aktif dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri, mengidentifikasi masalah bersama, dan merumuskan solusi kolektif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun demikian, ketidakmerataan kesadaran dan motivasi partisipasi di kalangan masyarakat mencerminkan adanya kesenjangan partisipasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomi dan akses terhadap informasi. Verba et al. (1995) menekankan bahwa kesenjangan dalam sumber daya seperti pendidikan, pendapatan, dan waktu luang dapat menciptakan ketimpangan partisipasi politik, di mana kelompok dengan sumber daya yang lebih besar cenderung lebih aktif berpartisipasi dibandingkan kelompok yang kurang beruntung. Fenomena ini juga dijelaskan oleh Lijphart (1997) yang mengidentifikasi bahwa partisipasi politik cenderung bias terhadap kelompok sosial-ekonomi atas, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak representatif terhadap kepentingan seluruh masyarakat. Dalam konteks Desa Silian, kesenjangan partisipasi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi inklusif yang menekankan pentingnya kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif (Young, 2000).

b. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik

Strategi peningkatan partisipasi melalui mobilisasi dan pendekatan personal yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan teori mobilisasi politik yang dikemukakan oleh Rosenstone dan Hansen (1993) yang menekankan bahwa partisipasi politik sering kali dimediasi oleh upaya mobilisasi dari elite politik, organisasi, atau tokoh masyarakat yang mengajak dan memotivasi warga untuk terlibat. Dalam konteks desa, peran tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Brady et al. (1999) juga mengidentifikasi bahwa recruitment atau ajakan untuk berpartisipasi merupakan salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan partisipasi politik, terutama bagi kelompok yang secara tradisional kurang aktif. Strategi mobilisasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kampanye saat pemilihan umum, tetapi memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik dan mengembangkan kebiasaan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Almond & Verba, 1963).

Pentingnya pendidikan politik dan literasi demokrasi sebagai strategi peningkatan partisipasi didukung oleh berbagai literatur yang menekankan hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik. Delli Carpini dan Keeter (1996) menunjukkan bahwa pengetahuan politik (political knowledge) merupakan prediktor kuat bagi partisipasi politik yang efektif, karena warga yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik, hak

dan kewajiban mereka, serta isu-isu publik cenderung lebih aktif dan kritis dalam berpartisipasi. Dalam konteks desa, program pendidikan politik dapat mengambil berbagai bentuk seperti sosialisasi tentang peraturan desa, pelatihan kepemimpinan, simulasi musyawarah, dan diskusi publik tentang isu-isu lokal yang relevan dengan kehidupan masyarakat (Nurcholis, 2011). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, dapat memperluas akses informasi dan membuka ruang deliberasi yang lebih inklusif, sebagaimana dikemukakan oleh Coleman dan Blumler (2009) bahwa teknologi digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dengan mengurangi biaya informasi dan komunikasi serta memfasilitasi interaksi horizontal antar warga.

Strategi peningkatan partisipasi yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender dan inklusi kelompok marginal mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya deliberasi yang inklusif dan setara. Young (2000) berpendapat bahwa demokrasi yang sejati memerlukan inklusi dari semua kelompok yang terkena dampak oleh keputusan kolektif, termasuk kelompok yang secara historis terpinggirkan seperti perempuan, minoritas, dan kelompok ekonomi lemah. Mansbridge (1999) juga menekankan bahwa representasi deskriptif, yaitu kehadiran anggota dari kelompok yang kurang terwakili dalam forum-forum politik, dapat meningkatkan legitimasi demokrasi dan memastikan bahwa perspektif yang beragam dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Silian, partisipasi aktif perempuan merupakan indikator positif bagi demokratisasi, namun perlu didukung dengan mekanisme institusional yang memastikan bahwa suara mereka benar-benar didengar dan berpengaruh terhadap kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan Sutiyo dan Maharjan (2017) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan desa yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

c. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Partisipasi Politik

Kesenjangan antara partisipasi formal dan substantif yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam implementasi demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Arnstein (1969) dalam tangga partisipasi (*ladder of participation*) mengidentifikasi bahwa tidak semua bentuk partisipasi memiliki tingkat pemberdayaan yang sama, di mana bentuk-bentuk partisipasi yang bersifat tokenistik atau manipulatif hanya memberikan ilusi keterlibatan tanpa memberikan kekuasaan riil kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan. Partisipasi yang bersifat simbolik ini sering kali terjadi ketika forum-forum partisipasi diselenggarakan hanya untuk memenuhi persyaratan formal tanpa ada komitmen genuine dari penyelenggara untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat (Cornwall, 2008). Dalam konteks desa, dominasi elite lokal dapat menciptakan situasi di mana keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh segelintir orang, sementara forum partisipasi hanya berfungsi sebagai legitimasi formal terhadap keputusan yang telah dibuat, sebagaimana ditemukan oleh Pradana et al. (2017) dalam penelitiannya tentang implementasi demokrasi desa.

Hambatan kultural berupa hierarki sosial, patronase, dan paternalisme yang menghambat partisipasi kelompok tertentu dapat dijelaskan melalui perspektif struktural tentang kekuasaan dan dominasi. Gaventa (2006) mengidentifikasi tiga dimensi kekuasaan yang mempengaruhi partisipasi: kekuasaan yang tampak (*visible power*) dalam bentuk pengambilan keputusan formal, kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) dalam bentuk agenda setting yang mengontrol isu apa yang dibahas, dan kekuasaan tak terlihat (*invisible power*) dalam bentuk norma dan nilai yang membentuk persepsi tentang siapa yang berhak berpartisipasi dan bagaimana partisipasi seharusnya dilakukan. Dalam konteks masyarakat desa yang masih kental dengan tradisi dan hierarki sosial, kekuasaan tak terlihat ini dapat sangat membatasi partisipasi kelompok marginal dengan menciptakan sikap fatalistik atau *self-censorship* di mana mereka

merasa tidak berhak atau tidak mampu untuk menyuarakan pendapat (Lukes, 2005). Transformasi hambatan kultural ini memerlukan waktu dan upaya yang sistematis untuk mengubah norma dan nilai melalui pendidikan, dialog, dan pemodelan perilaku inklusif oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat (Mansuri & Rao, 2013).

Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam memfasilitasi partisipasi yang efektif merupakan tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Blair (2000) menekankan bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat bergantung pada kapasitas institusi lokal untuk mengelola partisipasi, menyediakan informasi yang transparan, dan mengimplementasikan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Desa telah memberikan kerangka legal bagi partisipasi masyarakat, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (Antlov et al., 2016). Smith (2009) juga mengidentifikasi bahwa desain institusional dari forum-forum partisipasi sangat menentukan kualitas deliberasi dan representativitas keputusan yang dihasilkan, di mana forum yang tidak dirancang dengan baik dapat menghasilkan diskusi yang didominasi oleh kelompok tertentu dan menghasilkan keputusan yang tidak representatif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam penguatan kapasitas aparatur desa, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang lebih baik, serta penciptaan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah desa (Nurcholis, 2011).

D. Kesimpulan

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Silian mengungkapkan bahwa kesadaran politik masyarakat telah berkembang dengan baik, ditandai oleh pemahaman bahwa partisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat desa. Motivasi untuk berpartisipasi didorong oleh keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa dan memperoleh pembelajaran politik, yang mencerminkan dimensi edukatif dari partisipasi demokratis. Namun, kesadaran dan motivasi ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, dengan kesenjangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan akses informasi. Strategi peningkatan partisipasi melalui mobilisasi, pendidikan politik, dan pendekatan inklusif telah mulai diterapkan, dengan indikator positif berupa partisipasi aktif dari berbagai kelompok termasuk perempuan. Meskipun demikian, implementasi partisipasi politik masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antara partisipasi formal dan substantif, hambatan kultural berupa hierarki sosial dan dominasi elite, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam memfasilitasi partisipasi yang bermakna.

Untuk mewujudkan demokrasi partisipatif yang lebih berkualitas di Desa Silian, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik berkelanjutan, transformasi nilai dan norma sosial yang membatasi partisipasi kelompok marginal, serta peningkatan kapasitas institusional pemerintah desa dalam mengelola partisipasi secara efektif dan akuntabel. Rekomendasi kebijakan meliputi pengembangan program literasi demokrasi yang sistematis dan inklusif, penciptaan mekanisme partisipasi yang lebih inovatif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat, penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui sistem informasi publik yang mudah diakses, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program pembangunan desa. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan partisipasi masyarakat dapat bergerak dari yang bersifat simbolik menuju partisipasi substantif yang benar-benar memberdayakan masyarakat dan menghasilkan tata

kelola desa yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Blair, H. (2000). Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries. *World Development*, 28(1), 21-39.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1999). Prospecting for Participants: Rational Expectations and the Recruitment of Political Activists. *American Political Science Review*, 93(1), 153-168.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy*. Cambridge University Press.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why It Matters*. Yale University Press.
- Gaventa, J. (2004). Towards Participatory Governance: Assessing the Transformative Possibilities. In S. Hickey & G. Mohan (Eds.), *Participation: From Tyranny to Transformation?* (pp. 25-41). Zed Books.
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Lijphart, A. (1997). Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma. *American Political Science Review*, 91(1), 1-14.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Mansbridge, J. (1999). Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent "Yes". *Journal of Politics*, 61(3), 628-657.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Pradana, G. Y. K., Retnowati, E., & Soeaidy, M. S. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa. *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 20(2), 90-97.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton

- University Press.
- Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (1993). *Mobilization, Participation, and Democracy in America*. Macmillan.
- Smith, G. (2009). *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Springer.
- Suwarno, Y. (2016). Demokrasi Desa: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45-58.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT RajaGrafindo Persada.
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.